

Kembalikan Uang Perdin Dobel

KLATEN—Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah mengeluarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) keuangan daerah Pemkab Klaten. BPK menemukan adanya perjalanan dinas (perdin) dubel sehingga pejabat wajib mengembalikan uang tersebut ke kas daerah.

Ayu Abriyani K.P.
redaksi@solopos.co.id

“Dua bulan terakhir, BPK telah memeriksa laporan keuangan daerah Pemkab Klaten. Secara resmi, BPK telah mengeluarkan LHP dan Klaten mendapat opini wajar dengan pengecualian [WDP]. Sebab, masih banyak rekomendasi BPK yang belum selesai ditindaklanjuti SKPD [satuan kerja perangkat daerah]. Ini yang membuat Klaten tidak bisa meraih WTP [wajar tanpa pengecualian],” kata Kepala Bidang Akuntansi dan Pembiayaan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Klaten, Purwanto Agus Raharjo, kepada wartawan di ruang kerianva. Senin (26/5).

► **Pemkab Klaten menerima wajar dengan pengecualian (WDP) atas pemeriksaan keuangan daerah.**

► **Bupati minta SKPD melaksanakan rekomendasi BPK.**

Selain itu, Agus menambahkan adanya penyimpangan dalam kebijakan juga menjadi faktor Klaten masih mendapat opini WDP. Beberapa temuan BPK dalam laporan keuangan daerah yakni adanya perjalanan dinas dubel yang dilakukan pejabat di beberapa SKPD. Jadi, lanjut dia, ada pejabat yang melakukan perjalanan dinas ke tempat yang berbeda dalam waktu yang sama.

Ia menjelaskan anggaran yang digunakan untuk perjalanan dinas dubel itu memang tidak besar dan besarnya puluhan juta. Tapi, SKPD terkait wajib menindaklanjuti dengan mengembalikan uang yang mereka gunakan karena telah menjadi temuan BPK.

Kewenangan Inspektorat

“Tahun lalu juga ada temuan hal yang sama, tetapi di SKPD yang berbeda. Dan ini ada temuan yang sama. Berdasarkan rekomendasi BPK, pejabat yang melakukan perjalanan dinas dubel tersebut harus mengembalikan uangnya ke kas daerah. Hal itu menjadi kewenangan Inspektorat Daerah untuk berkoordinasi dengan SKPD terkait,” ujar dia.

Bupati Klaten, Sunarna, menyatakan SKPD terkait wajib menindaklanjuti temuan BPK tersebut. Sebab, LHP merupakan bagian dari evaluasi yang dilakukan BPK terhadap kinerja SKPD di semua daerah. “Kami berusaha agar dalam LHP selanjutnya mendapat opini WTP. Untuk itu, kami bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan [BPKP] sebagai upaya perbaikan laporan keuangan daerah,” kata dia kepada wartawan.